



Perebutan Air dan Ketidakberdayaan Kelompok Tani Dalam Menjaga Irigasi Studi Kasus di Padukuhan Bayen, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

**Anggalih Bayu Muh Kamim*, Arya Hadi Dharmawan,
Melani Abdulkadir-Sunito, Bayu Eka Yulian**

IPB University, Bogor, Indonesia

*anggalihbayu@apps.ipb.ac.id

Abstract

This study analyzes the inability of “peasant organization” to control irrigation resources in rural-urban areas. Water disputes have arisen among peasants in rural-urban areas due to their limited capacity to organize themselves and manage available resources. This research seeks to examine the weaknesses in the role of peasant organizations in coordinating the use of irrigation resources. This study is a qualitative research using case study approach, focusing on Bayen sub-village, District of Sleman Special Region of Yogyakarta. The data collection process was done via in-depth interviews, documentation techniques, and field observation. The analyst’s work progressed from study preparation to data verification and conclusion. The research reveals that elite peasants have become central actors in water disputes, undermining the effectiveness of peasant organizations. Furthermore, both local and village governments fail to adequately support these organizations due to budgetary constraints and limited policymaking capacity. The “peasant organization” also does not have sufficient capacity to coordinate with other peasants in many different areas surrounding Bayen sub-village. The study shows that the bad condition of irrigation in Bayen sub-village is related to the lack of capacity of peasants to negotiate with different actors that have many different interests. Urban economic expansion led to the establishment of an ice factory, disrupting peasant irrigation systems. The toll road project, a consequence of urban economic expansion, has also disrupted irrigation systems in the region. As a result of these problems, the peasants, together with the head of Bayen sub-village, can only promote the use of toll drainage as an emergency irrigation measure.

Keywords: Peasant Organization; Irrigation; Power Relations; Urban Economic Expansion

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menganalisis ketidakberdayaan kelompok tani dalam menjaga pengairan lahan dalam konteks desa perkotaan. Perebutan air marak terjadi di antara petani di desa perkotaan, sehingga harus dilakukan kajian lebih lanjut untuk mendalami lemahnya peran kelompok tani dalam koordinasi pengairan. Kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang dibatasi di Padukuhan Bayen, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, metode dokumentasi, dan observasi. Analisis data pada dasarnya dilakukan sejak perencanaan sampai dengan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Kajian ini menunjukkan bahwa kelompok tani tidak dapat berfungsi dengan baik akibat elit petani sendiri menjadi pelaku penyerobotan penggunaan air. Pemerintah daerah sampai pemerintah desa tidak mampu memfasilitasi kelompok tani dengan baik akibat keterbatasan anggaran dan kapasitas dalam kebijakan. Kelompok tani juga tidak mampu

membangun koordinasi dengan para petani di padukuhan lainnya dalam menjaga irigasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengairan lahan yang tidak baik di Padukuhan Bayen tidak dapat dilepaskan dari ketidakmampuan para petani melalui kelompok tani untuk membangun negosiasi dengan aktor-aktor yang memiliki kepentingan yang berbeda. Perluasan ekonomi perkotaan memicu hadirnya pabrik es yang membuat gangguan pengairan bertambah parah. Kehadiran proyek tol menambah parah gangguan pengairan, di mana elit petani membiarkan para petani untuk menyuarakan pemulihan irigasi. Para petani bersama kepala dukuh Bayen hanya mampu mengupayakan penggunaan drainase tol sebagai irigasi darurat.

Kata Kunci: Kelompok Tani; Pengairan Lahan; Relasi Kuasa; Ekspansi Ekonomi Perkotaan

Pendahuluan

Perebutan air kerap terjadi dialami oleh para petani dalam pengairan lahan pertanian di desa perkotaan (Arifah et al., 2022; Sriartha et al., 2023). Studi Arifah et al., (2022); Sriartha et al., (2023) menemukan bahwa perebutan air di desa perkotaan yang dihadapi para petani terjadi akibat melurnya pewarisan pengetahuan mengenai kondisi lingkungan secara lintas generasi, perluasan ekonomi non-pertanian, dan beban produksi yang bertambah akibat upah buruh tani yang semakin mahal. Studi mengenai ketidakberdayaan kelompok tani (poktan) dalam mengkoordinasikan pengairan lahan dan kemudian memicu perebutan air, sayangnya masih terbatas.

Hal tersebut menjadi pintu masuk untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai ketidakberdayaan kelompok tani, terutama untuk melihat para petani yang masih berupaya mempertahankan penggunaan air untuk pertanian di desa perkotaan. Urbanisasi apalagi membawa persoalan dengan memicu fragmentasi jaringan irigasi dan hilangnya daerah resapan air dari sawah untuk menopang produksi pertanian (Rondhi et al., 2024). Produktivitas pertanian padi dari desa perkotaan di Jawa di sisi lain masih baik pada daerah beririgasi (Rondhi et al., 2024).

Kajian-kajian berkaitan dengan perebutan air maupun penggunaan irigasi di Indonesia, sayangnya masih terbatas dilakukan di desa pedesaan yang memiliki karakteristik moda penghidupan pertanian yang kuat dan tidak menghadapi persoalan fragmentasi lahan dan pengairan selayaknya wilayah desa perkotaan (Rondhi et al., 2024). Studi berkaitan dengan peran dari kelompok tani maupun P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) dalam koordinasi pengairan lahan terbatas dilakukan di desa pedesaan, di mana di antaranya mencermati peran kelembagaan petani yang masih *trial and error* pada penggunaan air akibat regulasi yang tumpang tindih, keterbatasan sumber daya dan lemahnya pendampingan pemerintah (Rondhi et al., 2020).

Kajian lainnya dalam konteks desa pedesaan yang bergantung pada ekonomi pertanian menunjukkan bahwa gangguan dari aktivitas non-tani seperti pertambangan mampu membuat petani sulit mendapatkan air akibat kerusakan lingkungan (Ma'mun et al., 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa gangguan pengairan lahan di desa pedesaan pun muncul disebabkan pertarungan kepentingan ekonomi politik yang beragam, di mana petani yang menanam komoditas yang berbeda pun dapat saling bersaing (Ma'mun et al., 2021). Elit petani di desa pedesaan pun sering mengendalikan pengairan lahan untuk kepentingannya sendiri, sehingga pengambilan keputusan secara kolektif dalam pengairan lahan tidak terjadi dengan baik (Harrison, 2020).

Partisipasi dan representasi yang berjalan sebenarnya berperan penting dalam koordinasi yang baik dalam pengairan lahan (Budiman et al., 2021). Penggunaan air dapat bersaing pula dengan peruntukan lainnya seperti untuk energi, pangan dan air minum, sehingga pengairan lahan tidak dikoordinasikan dengan baik antara kelompok tani dengan

aktor lainnya (Nugroho et al., 2022). Studi sebelumnya dalam konteks desa pedesaan juga menunjukkan pula bahwa petani melalui kelompok tani memiliki keterbatasan finansial dan kemampuan sosial dalam membangun dan memperbaiki sendiri saluran irigasi yang terbatas (Alcon et al., 2022). Ketersediaan jangkauan pasar, kondisi rumah tangga, infrastruktur dan teknologi, serta kemampuan ekonomi dari petani memengaruhi kemampuan mereka secara kolektif dalam menjaga pengairan lahan (Alaerts, 2020). Kelompok tani kesulitan untuk membangun kerjasama dengan aktor lainnya, termasuk pemerintah (Nawiyanto et al., 2024). Hal tersebut membuat petani kesulitan mendapatkan program dari pemerintah maupun bantuan aktor lainnya untuk menopang pengairan lahan yang memadai di desa pedesaan (Nawiyanto et al., 2024). Kelompok tani di desa pedesaan pun tidak selalu dapat menjaga soliditasnya untuk mencegah perebutan air antara sesama petani (Jansing et al., 2020).

Soliditas sendiri dapat terganggu disebabkan petani yang memiliki luas garapan lahan atau bahkan kepemilikan lahan terlalu di desa pedesaan pun yang mengendalikan penggunaan sarana irigasi (Gatti et al., 2021). Para petani lainnya tetap dipinggirkan oleh mereka yang lebih memiliki sumber daya dan posisi kuat secara ekonomi politik, meskipun sudah ada kelompok tani (Gatti et al., 2021). Pemerintah di sisi lain dapat melemahkan daya tawar kelompok tani itu sendiri dengan membatasi ruang gerak secara politis dari para petani dalam penggunaan air (Tirtalistyani et al., 2022).

Para petani di desa pedesaan sebenarnya tetap bergantung pada kemampuan membangun aliansi kuasa dengan elemen warga lainnya, kala berhadapan dengan pemerintah maupun aktor lainnya untuk memastikan pengairan lahan dapat berjalan dengan baik (D'Odorico et al., 2024). Kelembagaan lokal seperti *subak* bergantung kepada kemampuan proses pembelajaran secara kolektif, begitu pula kelompok tani untuk memastikan pengairan lahan tidak terganggu (Okura et al., 2022). Berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih banyak dilakukan di desa pedesaan dan perebutan penggunaan air di antara para petani tidak terlalu kuat dibandingkan dengan wilayah desa perkotaan.

Kajian ini membawa kebaruan dengan menganalisis ketidakmampuan petani di Padukuhan Bayen yang berstatus bagian area desa perkotaan untuk mengkoordinasikan pengairan lahan melalui kelompok tani sampai dengan masuknya proyek tol Surakarta-Yogyakarta. Studi Arifah et al., (2022); Sriartha et al., (2023) sudah menemukan fenomena perebutan air yang sering dihadapi para petani di desa perkotaan dibandingkan desa pedesaan, tetapi belum mendalami ketidakberdayaan kelembagaan poktan dalam mengkoordinasikan penggunaan irigasi. Kelompok tani di Padukuhan Bayen, Kabupaten Sleman, DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) tidak mampu mengkoordinasikan pengairan lahan dengan menghadapi relasi kuasa yang kompleks. Petani Padukuhan Bayen harus berhadapan dengan warga padukuhan lainnya, investor dan upaya pengembangan ekonomi perkotaan yang semakin mempersulit keadaan pengairan lahan terutama dalam hal fragmentasi lahan maupun pengairan sampai hadirnya proyek tol (Peluso & Ribot, 2020). Kontestasi dan pertarungan aktor dengan kepentingan beragam yang bersinggungan dengan kelompok tani, seharusnya mampu menjadi momentum bagi para petani untuk memperjuangkan penggunaan air untuk pertanian (Peluso & Ribot, 2020).

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis ketidakberdayaan kelompok tani di desa perkotaan yang menghadapi perluasan ekonomi non-pertanian yang membuat akses petani dalam pengairan lahan menjadi terganggu, akibat berbenturan dengan kepentingan dari aktor yang berbeda-beda. Kajian ini setidaknya berupaya menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertanyaan pertama yang berupaya dijawab adalah mengapa kelompok tani di Padukuhan Bayen, DIY tidak berdaya mengkoordinasikan penggunaan air dengan baik bagi para petani? Kedua, Bagaimana pertarungan kepentingan dari aktor yang berbeda-beda membuat penggunaan air yang dikoordinasikan melalui kelompok tani tidak

berjalan dengan baik di Padukuhan Bayen?. Kajian ini memberikan manfaat pada khalayak maupun pemerintah bahwa penggunaan irigasi di desa perkotaan melalui kelompok tani yang tidak berjalan dengan baik semata bukan salah kepentingan yang beragam dari para petani, melainkan juga berkaitan dengan aktor lainnya pula dengan aktivitas yang berdampak pula terhadap pengairan lahan. Kajian ini membawa kebaruan bahwa petani non-elit yang tidak memiliki kendali atas kelompok petani membuat petani non-elit tidak dapat mengairi lahan dengan baik. Analisis jalinan kuasa menjadi penting untuk menunjukkan para petani non-elit di desa perkotaan tidak berdaya menghadapi aktor-aktor yang memiliki kepentingan untuk memperkuat pengembangan ekonomi pertanian dibandingkan mempertahankan irigasi dalam menopang moda penghidupan pertanian.

Padukuhan Bayen, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan (dalam istilah daerah lainnya disebut kecamatan), Kabupaten Sleman, DIY dipilih sebagai lokasi dan kasus studi dengan pertimbangan sebagai cerminan dari Kalurahan Purwomartani yang menjadi satu-satunya desa di Kapanewon Kalasan yang masuk ke dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Rif'an, 2019). Pabrik-pabrik banyak beroperasi di sekitar Padukuhan Bayen termasuk di dalamnya operasional pabrik es dengan sumur bor yang mengganggu pengairan dan memicu konversi lahan. Kelompok tani yang tidak berfungsi dengan baik di Padukuhan Bayen membuat petani non-elit memilih menggunakan sumur ladang dan mesin diesel untuk mengairi lahannya, sehingga menjadi keunikan sendiri untuk menganalisis lebih lanjut ketidakberfungsian dari kelompok tani di tengah jalinan kuasa aktor yang kompleks sampai dengan hadirnya proyek pembangunan jalan tol.

Metode

Kajian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif dengan pertimbangan berupaya membangun kebenaran ilmiah yang bersifat intersubjektif dari berbagai informan yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Penjajakan studi dilakukan sejak Desember 2023 sampai Januari 2024 dan turun lapang dilakukan pada September s.d. November tahun 2024. Teknik yang digunakan adalah studi kasus dengan pilihan untuk melihat realitas yang khas pada keterbatasan kemampuan kelompok tani dalam menjaga pengairan lahan di desa perkotaan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap para informan yang terdiri atas para pengurus dan anggota kelompok tani Ngudi Makmur di Padukuhan Bayen, pemerintah Kalurahan Purwomartani, Jawatan Kemakmuran Kapanewon Kalasan, DPUPKP (Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Sleman, DP3 (Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan) Kabupaten Sleman, DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kabupaten Sleman, Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan dan Perikanan Wilayah VIII (Prambanan dan Kalasan), dan kepala dukuh Bayen. Observasi dilakukan pula terhadap pengairan lahan oleh para petani dan aktivitas warga di sekitar saluran irigasi dan diikuti pula dengan metode dokumentasi dengan penelusuran dokumen pemerintahan studi terkait, serta pemberitaan media daring berkaitan pengairan lahan di Padukuhan Bayen. Analisis data pada dasarnya dilakukan sejak penjajakan studi sampai dengan proses verifikasi dan penarikan kesimpulan, di mana data yang sudah dikumpulkan kemudian dikelompokkan, direduksi, dan dicari benang merahnya untuk menganalisis realitas yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

1. Keterbatasan Kemampuan Koordinasi Kelompok Tani dalam Penggunaan Air

DP3 Kabupaten Sleman berperan mendampingi aktivitas petani melalui PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Kalurahan Purwomartani yang terkadang mengikuti pertemuan poktan setiap 35 hari sekali. Pertemuan poktan menjadi forum untuk

membahas koordinasi pengairan di Padukuhan Bayen. Padukuhan Bayen meliputi tiga Daerah Irigasi (DI) yakni DI Babadan yang terletak pada sisi utara padukuhan dan DI Kujon serta DI Ngasem yang berada di bagian selatan wilayah permukiman. Kelompok tani menjadi wadah untuk koordinasi pengairan, meskipun ketiga DI sebenarnya mencakup lebih dari satu padukuhan bahkan area lintas desa yang mendapatkan air dari sungai Tepus. Berikut adalah rincian padukuhan yang tergabung dalam ketiga DI yang berkaitan dengan padukuhan Bayen:

Tabel 1. Wilayah Kerja Irigasi di Tiga Daerah Irigasi di Padukuhan Bayen, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, 2025

No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Wilayah Irigasi
1	Babadan	Padukuhan Bayen dan Padukuhan Babadan, Kalurahan Purwomartani, Padukuhan Kalimati, Plasan, dan Pundung yang masuk Kalurahan Tirtomartani.
2	Kujon	Padukuhan Bayen dan Padukuhan Karangmojo, Kalurahan Purwomartani.
3	Ngasem	Padukuhan Bayen dan Somodaran, Kalurahan Purwomartani, serta Padukuhan Tegalsari, Kalurahan Tirtomartani.

Sumber: Data Primer, 2025

Tiap padukuhan memiliki pengaturan pengairan masing-masing dalam penggunaan air untuk pertanian. Kelompok tani di Padukuhan Bayen tidak berkoordinasi dengan poktan dari padukuhan di sekitarnya, padahal semestinya dalam satu DI ada koordinasi dan kerjasama dalam penggunaan air. Koordinator pengairan ditunjuk melalui pertemuan poktan. Misalnya mantan kepala dukuh Bayen periode 2011-2023 yang juga ketua gapoktan (gabungan kelompok tani) di tingkat kalurahan, saat ini menjadi pemegang kendali dari DI Kujon dan DI Ngasem bersama para pengurus kelompok tani Ngudi Makmur. Koordinator DI Babadan untuk area Padukuhan Bayen bukan pengurus poktan, melainkan petani yang ditunjuk oleh sesama petani yang menggarap lahan di area utara Padukuhan Bayen. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam satu padukuhan pun terdapat koordinasi yang tidak terjalin dengan baik. Ketua kelompok tani jarang hadir dalam pertemuan dan keluhan berkaitan dengan masalah pengairan tidak pernah direspon dengan baik. PPL hanya dapat membangun koordinasi dengan bendahara dan sekretaris poktan untuk mengawal budidaya pertanian. PPL bersama kepala dukuh Bayen yang baru menjabat sejak tahun 2023 dan pengurus poktan mengupayakan regenerasi ketua kelompok tani, meskipun anggota merasa takut kepada elit petani.

Koordinasi PPL dengan pengurus poktan yang bukan berstatus sebagai elit petani setidaknya mampu mendorong hadirnya program sumur ladang. Program sumur ladang dari DP3 Kabupaten Sleman dibawa oleh salah satu pengurus poktan yang diangkat menjadi PPS (Penyuluh Pertanian Swadaya) sejak tahun 2018. Kehadiran sumur ladang dari dinas setidaknya membantu pengairan, tetapi ada petani non-elit yang memilih membuat sumur ladang dan membeli mesin diesel untuk mengairi lahan. Langkah tersebut dipilih oleh petani untuk menghindari perebutan air dengan sesamanya. PPS dan PPL bersama pengurus poktan sayangnya tidak mampu mencegah dan menindak penyerobotan penggunaan air yang dilakukan oleh elit petani. Petani non-elit hanya dapat memilih mengupayakan untuk menanam tanaman yang sedikit membutuhkan air dibandingkan dengan padi, saat air yang tersedia dirasakan memang terbatas.

Para petani non-elit juga tidak mampu mengingatkan elit petani yang suka membendung irigasi dengan batu besar, padahal tindakan tersebut dapat membuat bangunan saluran mudah rusak. Para petani non-elit hanya bergantung pada komunikasi

pribadi dalam penggunaan air di saluran irigasi. Kejadian yang ada di Padukuhan Bayen sebagai desa perkotaan pada dasarnya mirip dengan apa yang terjadi di desa pedesaan, di mana elit petani apalagi yang memiliki koneksi dengan pemerintah desa memiliki kendali atas pengairan (Suhardiman, 2018).

Studi Suhardiman (2018) di salah satu desa pedesaan di Kabupaten Kulonprogo, DIY menunjukkan bahwa elit petani menggunakan koneksi politik dan penguasaan sumber daya untuk mengalirkan air untuk diprioritaskan pada lahan garapannya sendiri. Petani non-elit di desa pedesaan pun hanya dapat melakukan strategi seperti bergantung pada negosiasi dengan sesama petani non-elit lainnya dan menghindari konflik terbuka dengan elit petani (Suhardiman, 2018). Hal tersebut sepertinya menunjukkan bahwa baik dalam konteks desa perkotaan seperti Padukuhan Bayen maupun desa pedesaan di DIY pada dasarnya elit petani lah yang mengendalikan pengairan lahan dan meminggirkan petani lainnya (Suhardiman, 2018).

PPL maupun sampai level DP3 Kabupaten Sleman mengaku tidak mampu mencegah konversi lahan beririgasi yang berdampak pula terhadap ketersediaan air untuk pertanian. DP3 Kabupaten Sleman tidak memiliki kendali atas tata guna lahan dan tata air yang berkaitan dengan petani selaku pengguna air. PPL sebatas dapat membantu penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang di antaranya memuat perkiraan luas lahan yang dimiliki oleh pemilik lahan untuk budidaya pertanian. RDKK menjadi salah satu landasan dalam pengajuan program pemberian input dan sarana produksi oleh DP3 Kabupaten Sleman.

Kelompok tani di Padukuhan Bayen tidak mengajukan kuota bahan bakar minyak yang semestinya dapat digunakan untuk operasional mesin diesel oleh para petani, sebab operasional organisasi tidak berjalan dengan baik. DPUPKP Kabupaten Sleman melalui UPTD SDA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Sumber Daya Air) Sleman Timur memfasilitasi petani sebatas pada perbaikan dan pembangunan sarana irigasi. Peran DPUPKP Kabupaten Sleman dalam fasilitasi sarana irigasi bergantung pada keaktifan petani melalui poktan untuk melaporkan kondisi irigasi, tetapi selama ini koordinasi sebatas dilakukan dengan elit petani. Elit petani merasa bahwa pengairan lahan di Padukuhan Bayen berada dalam kondisi baik.

UPTD SDA Sleman Timur tidak selalu dapat melakukan pemantauan rutin kondisi irigasi, sebab memiliki keterbatasan ketersediaan buruh harian lepas. Elit petani justru memandang bahwa petani cukup menerima kinerja DPUPKP Kabupaten Sleman tanpa harus ikut dalam pengawasan konstruksi. Kas poktan di Padukuhan Bayen tidak mencukupi untuk perbaikan sarana, sehingga peninjauan dari UPTD Sleman Timur menjadi basis informasi utama dalam pengajuan perbaikan maupun pembangunan. Poktan tidak mampu melakukan pembaruan administrasi yang penting untuk memperkirakan kemampuan iuran dalam pengisian kas.

Kelompok tani Ngudi Makmur sebenarnya saat ini hanya memiliki sekitar 30-an anggota aktif, di mana sebanyak 80-90 orang masih tercatat sebagai anggota. Penurunan jumlah anggota aktif sendiri tidak dapat dilepaskan dari masifnya konversi lahan dan peralihan pekerjaan warga Bayen yang sebelumnya bekerja sebagai petani. Keterbatasan anggaran dari DP3 Kabupaten Sleman dan DPUPKP Kabupaten Sleman berkaitan pula dalam minimnya pendampingan maupun penyediaan sarana. DPUPKP Kabupaten Sleman tidak mampu mengatasi konversi lahan, meskipun menjadi pihak yang memberikan rekomendasi alih fungsi peruntukan.

DPUPKP Kabupaten Sleman memandang bahwa banyaknya acara informal di desa membuat petani non-elit tidak mampu secara optimal menggerakkan poktan. Pemerintah Kalurahan Purwomartani mengakui tidak mampu menggerakkan kelembagaan petani pada daerah irigasi yang mencakup lebih dari satu padukuhan apalagi

lintas desa. Pemerintah Kalurahan Purwomartani mengakui bahwa kemampuan anggaran desa masih terbatas untuk memperbaiki dan membangun saluran irigasi maupun mendampingi kegiatan petani. Pemerintah Kalurahan Purwomartani mengeluhkan keterbatasan pendampingan dari dinas terkait dengan pembinaan poktan.

Pemerintah Kalurahan Purwomartani mengakui bahwa tidak dapat melibatkan poktan secara kolektif dalam pengusulan program yang akan didanai dengan anggaran desa. Pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Purwomartani terhadap para petani yang dipilih untuk mengikuti pelatihan pun tidak mampu menjadi penggerak bagi petani lainnya apalagi menggerakkan poktan untuk lebih baik dalam mengoordinasikan penggunaan air. Pemerintah Kalurahan Purwomartani juga mengakui bahwa adanya pandemi Covid-19 sempat menyulitkan untuk pelaksanaan program yang berkaitan dengan fasilitasi pengairan, sebab harus dialihkan dalam penanganan wabah.

Aparatur desa menghadapi kesulitan untuk memastikan poktan berfungsi dengan baik akibat tumpang tindih pengaturan terutama harus mengikuti pergantian regulasi dari satuan pemerintahan di atas kalurahan. Kepala dukuh Bayen selaku aparatur kalurahan hanya dapat ikut hadir secara pasif dalam pertemuan poktan dan sekadar memberikan himbauan untuk mencegah konversi lahan beririgasi serta mendorong petani menghindari perebutan air. Kepala dukuh Bayen di sisi lain sempat membantu pembangunan talud irigasi dengan membangun negosiasi dengan politisi lokal yang sedang melakukan kampanye pada pemilu 2024 dan membuahkan hasil dengan pembenahan saluran di Padukuhan Bayen.

Kepala dukuh Bayen kemudian membentuk tim pelaksana kegiatan (TPK) dalam konstruksi saluran tanpa melalui koordinasi dalam pertemuan poktan. Pembangunan sarana yang tidak partisipatif membuat ada petani perempuan yang harus mengeluarkan uang untuk membeli tanah uruk sebanyak 10 truk. Tanah uruk digunakan untuk meninggikan lahan si petani perempuan yang mengalami kesulitan pengairan setelah hadirnya proyek talud irigasi. Ada aparatur desa pula yang justru tidak mempedulikan kondisi sarana pengairan dengan begitu saja membat kebun sengan yang berada pada tanah kas desa menggunakan alat berat.

Penggunaan alat berat tanpa koordinasi dengan kelompok tani membuat sarana irigasi yang menjadi bagian dari DI Ngasem menjadi retak, tetapi para petani memilih diam sebab memiliki ketakutan dengan aparatur desa. Ketiadaan koordinasi dengan kelompok tani dari padukuhan lainnya membuat petani Padukuhan Bayen harus menanggung kesulitan pengairan akibat ketersediaan sarana yang terbatas. Misalnya terjadi pada kerusakan bendungan Babadan, meskipun koordinator dari DI Babadan pada area Padukuhan Bayen tetap menyetorkan iuran para petani sebesar 100 ribu rupiah setiap tahunnya kepada kelompok tani Padukuhan Babadan.

Kondisi tersebut yang membuat ketersediaan air di DI Babadan sangat terbatas dalam keadaan cuaca yang tidak menentu yang juga berkaitan dengan perubahan iklim. Kelompok tani di Padukuhan Babadan pun dipandang tidak aktif berkoordinasi dengan DPUPKP Kabupaten Sleman. Petani Bayen pada area DI Babadan sering membeli air dari sumur bor yang dikelola oleh kelompok tani di Padukuhan Sanggrahan dengan harga 70 ribu rupiah per jam. Biaya tersebut ditanggung bersama oleh petani yang membeli air. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengairan lahan pada area DI Babadan.

Kelompok tani Padukuhan Bayen juga tidak melakukan koordinasi dengan kelompok tani Padukuhan Sanggrahan, padahal sumur bor yang diberikan oleh pemerintah daerah pada tahun 2007 pun juga diberikan untuk mengairi lahan di Padukuhan Sanggrahan, Babadan, dan Bayen. Sebagai akibatnya, kelompok tani Padukuhan Sanggrahan harus menanggung sendiri biaya perawatan sumur bor. Hal ini

menjadi fakta tentang pengelola dengan ketiadaan koordinasi serta kerjasama antar kelompok. Ketiadaan koordinasi dengan kelompok tani Padukuhan Karangmojo juga membuat perbaikan bendungan Kujon tidak berhasil.

Pemerintah daerah sebenarnya mengupayakan pengerukan pasir pada bagian atas bendungan bendungan di tahun 2018, sebelum dilakukan perbaikan. Warga Padukuhan Karangmojo yang tinggal berdekatan dengan bendungan Kujon menentang pengerukan pasir untuk perbaikan bendungan dengan dalih memiliki ketakutan bahwa area lahan miliknya yang berdekatan dengan sungai Tepus menjadi longsor. Warga Padukuhan Karangmojo menentang keras upaya perbaikan bendungan dan berujung pada gagalnya pembenahan sarana pengairan sampai aparat kepolisian dan lurah Purwomartani hadir untuk menenangkan keadaan saat itu.

Petani Padukuhan Bayen menduga bahwa warga Karangmojo menolak perbaikan bendungan, sebab memiliki usaha penambangan pasir dengan menyedot pasir pada area sungai Tepus pada sisi Padukuhan Bayen. Warga Padukuhan Karangmojo yang tinggal di dekat bendungan Kujon diduga juga sengaja memanfaatkan sedimen pasir untuk memperluas kepemilikan lahan miliknya. Indikasi tersebut muncul pada saat Kepala Dukuh Karangmojo melihat terjadinya penyempitan area sungai. Hal ini terjadi saat dilakukan proses sertifikasi lahan milik warga.

Kelompok tani Karangmojo juga tidak merespon kejadian gagalnya pembenahan bendungan Kujon. Kelompok tani Padukuhan Bayen yang tidak mampu memastikan pengairan lahan berjalan dengan baik, pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari situasi ketidakmampuan untuk mempertemukan berbagai kepentingan para aktor berbeda yang bersinggungan dengan pemanfaatan sumber daya air irigasi di daerah tersebut. Tabel 2. menunjukkan aktor dan kepentingan yang membuat kelompok tani di Padukuhan Bayen tidak mampu mengorganisasikan pengairan bagi lahan pertanian di daerahnya.

Tabel 2. Aktor dan Kepentingan Para Pihak terkait Keberadaan Jaringan Irigasi di Padukuhan Bayen, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, 2025

No	Aktor	Kepentingan
1	DP3 Kabupaten Sleman	Memastikan kelembagaan kelompok tani dalam budidaya sesuai ketersediaan air.
2	DPUPKP Kabupaten Sleman	Memastikan kondisi sarana pengairan berada dalam kondisi baik.
3	PPL	Memastikan berjalannya kelembagaan poktan
4	Pemerintah Kalurahan Purwomartani	Memastikan kebutuhan petani difasilitasi.
5	Aparatur desa	Mengejar kebutuhan ekonominya sembari menjadikan pekerjaan kantornya sekadar formalitas untuk diselesaikan.
6	Kepala dukuh Bayen	Menjaga kondusivitas situasi padukuhan.
7	Elit petani Padukuhan Bayen	Mengendalikan pengairan sesuai kemauannya.
8	Petani non-elit Padukuhan Bayen	Menggunakan air dengan prinsip menghindari perebutan.
9	Warga Padukuhan Karangmojo	Memperluas lahan di dekat sungai Tepus dan menambang pasir.
10	Kelompok tani Padukuhan Sanggrahan	Memastikan sumur bor terkelola dengan baik.

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Ketidakmampuan dari para petani non-elit di Padukuhan Bayen untuk mendapatkan pendampingan secara memadai dari pemerintah daerah maupun pemerintah kalurahan tidak terlepas dari ketidakberdayaan untuk membangun jejaring kuasa dengan aktor lainnya dalam kebijakan (Ricks, 2016). Kajian Ricks (2016) menunjukkan bahwa kelompok tani di Kabupaten Sleman dan Bantul memang memiliki kemampuan yang terbatas dalam membangun kontrol publik, sehingga pemerintah daerah tidak mampu menjamin akses air yang bagi petani.

Petani non-elit di Kabupaten Sleman pada umumnya kesulitan untuk dapat mengontrol aktor-aktor lainnya yang berkaitan dengan pengairan lahan, sehingga membuat pemerintah daerah lebih memilih membangun jejaring kuasa dengan aktor selain petani yang lebih memberikan keuntungan bagi perekonomian daerah (Ricks, 2016). Kondisi tersebut juga sebenarnya tidak terlepas dari kepengaturan penggunaan air antara sektor pertanian dengan sektor lainnya yang belum dapat diselesaikan oleh pemerintah pusat hingga daerah (Nugroho et al., 2022).

Dukungan dari aktor lainnya terutama pemerintah sebenarnya sangat menentukan untuk memastikan petani non-elit melalui kelompok tani dapat menjalankan koordinasi pengairan dengan baik. Hal ini terutama kaitannya dengan penyediaan sumber daya dan pendampingan kelembagaan (Alaerts, 2020; Rondhi et al., 2020). Keterbatasan kemampuan untuk membangun jejaring dengan pemerintah serta kurangnya kapasitas pemerintah daerah membuat petani non-elit tidak mampu menggerakkan organisasi kelompok tani dengan baik dalam kaitannya dengan penggunaan jaringan irigasi (Alaerts, 2020; Rondhi et al., 2020).

Kondisi desa perkotaan yang membuat jumlah petani non-elit yang semakin berkurang dan tidak diikuti dengan perbaikan administrasi, menjadi kendala peningkatan kapasitas keuangan dari kelompok tani (poktan). Pendanaan dari anggota poktan sebenarnya dapat berperan penting juga untuk menjaga pengairan lahan sekaligus menggerakkan organisasi (Rustinsyah & Prasetyo, 2019). Kemampuan poktan dalam mengkoordinasikan pengairan dengan baik berkaitan dengan kepuasan anggota yang membuat para petani bersemangat untuk menggerakkan organisasi (Rustinsyah, 2019). Organisasi poktan yang tidak berjalan dengan baik dan telah dibajak oleh elit petani, membuat para petani non-elit menghadapi kesulitan dalam membangun kemampuan keuangan organisasi.

Pada akhirnya jalannya organisasi lebih mengandalkan pada kemampuan dukungan keuangan masing-masing petani. Para petani non-elit memanfaatkan kuasa berupa strategi komunikasi personal untuk memastikan lahannya mendapatkan pengairan secara memadai (Peluso & Ribot, 2020). Para petani non-elit hanya memiliki ikatan dengan sesamanya, meskipun terkadang saling berselisih paham dan menyerobot penggunaan air satu sama lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa hanya elit petani yang mampu menjangkau jaringan kekuasaan dalam mencapai satuan pemerintahan di luar desa dan mengamankan tindakannya untuk melakukan penyerobotan penggunaan air. Elit petani menjadi pihak yang paling berkemampuan untuk mengendalikan pemanfaatan air pengairan bagi lahan pertanian mereka di tengah lemahnya kemampuan para petani dan keterbatasan peran pemerintah desa dan pemerintah daerah (Peluso & Ribot, 2020).

Jaringan kekuasaan dalam penguasaan jaringan irigasi yang ada pada dasarnya bersifat cair, tetapi memiliki ketimpangan relasi kuasa antara elit petani dengan para petani lainnya. Para petani non-elit harus berjuang secara sendiri-sendiri dalam mengupayakan jejaring sosial secara personal dengan pihak penyedia sumur bor untuk dapat mengairi lahannya (Peluso & Ribot, 2020). Para petani non-elit di sisi lain tidak mampu menghadapi penyerobotan penggunaan air oleh elit petani maupun konflik serius dengan warga padukuhan lainnya yang menghalangi perbaikan bendungan akibat

memiliki kepentingan untuk memperluas lahan dan menambang pasir. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya kompleksitas kuasa yang dihadapi oleh para petani non-elit tidak terhubung dalam relasi yang bersifat horisontal, tetapi berhadapan dengan berbagai kepentingan ekonomi politik kompleks di sekitar Padukuhan Bayen.

2. Pertarungan Kepentingan Petani Dengan Aktor Lainnya Seiring Penguatan Ekonomi Perkotaan

Kehadiran berbagai pabrik dan pengembangan hunian tapak di sekitar Padukuhan Bayen sebagai konsekuensi masuk ke dalam desa perkotaan pada dasarnya tidak hanya memicu konversi lahan beririgasi, melainkan juga mendorong praktik bisnis yang mengancam kebutuhan pengairan. Praktik bisnis yang paling dirasakan dampaknya terhadap pengairan lahan dengan memicu keterbatasan air untuk pertanian di Padukuhan Bayen adalah berdirinya pabrik es kristal yang dikelola oleh PT YKS sejak sekitar tahun 2009. Pabrik es di Padukuhan Bayen beroperasi hampir 24 jam dan mengambil air dari sumur bor untuk diolah menjadi es kristal.

Para petani non-elit di DI Babadan merasakan dampak pengeboran terhadap berkurangnya ketersediaan air, begitu pula sumber air untuk DI Ngasem yang berada di bawah bendungan Kujon juga dirasakan mulai berkurang. Kelompok tani tidak mampu merespon dengan baik aspirasi dari para petani atas operasionalisasi dari pabrik es kristal di daerah mereka. Para petani non-elit di sekitar pabrik es kristal memilih menanam palawija maupun membiarkan lahannya tidak ditanami, apabila tidak mampu membeli air dari sumur bor Padukuhan Sanggrahan.

Pengusaha atau investor perusahaan besar pabrik es pada 5 Juni 2020 mengajukan pengembangan bisnis melalui izin lingkungan kepada DLH Kabupaten Sleman dengan syarat harus melakukan konsultasi publik terlebih dahulu dengan waktu tiga hari kerja, tetapi nampaknya kelompok tani tidak dilibatkan dalam proses pembahasan. Petani non-elit hanya dapat mengeluhkan dampak pabrik es di belakang layar. Pebisnis ingin menambah sumur dengan kedalaman 75 sampai 100 m untuk menambah kapasitas produksi. DLH Kabupaten Sleman pada 24 November 2020 telah memberikan izin lingkungan atas peningkatan produksi dari pabrik es kristal. Warga Bayen tetap keberatan dengan operasionalisasi dari pabrik es dan sempat melancarkan protes hingga Agustus 2024.

Elit petani yang juga Kepala Dukuh Bayen periode 2011-2023 saat masih menjabat kala terjadi protes, justru menganggap bahwa masyarakat setuju dengan operasiobalisasi pabrik es. Protes warga dipandang hanya sebagai persoalan berkaitan dengan komunikasi. Elit petani yang kini juga menjabat sebagai ketua gapoktan Kalurahan Purwomartani tidak pula mengajak petani lainnya untuk membahas persoalan eksistensi pabrik es di dalam forum diskusi kelompok tani Padukuhan Bayen. Elit petani memilih bersikap pasif, setelah sebelumnya juga didatangi pihak kepolisian dan aparat militer untuk meredam protes dari warga. Petani non-elit menduga bahwa izin lingkungan peningkatan produksi dapat diberikan, sebab pihak Rukun Tetangga (RT) 3 sebagai lokasi operasional bisnis sudah diberikan uang untuk penyelenggaraan acara informal oleh pengusaha terkait. Petani non-elit dan Kepala Dukuh Bayen yang baru menjabat sejak tahun 2023 sendiri masih merasa resah dengan operasionalisasi pabrik es.

DLH Kabupaten Sleman justru merasa tidak ada yang bermasalah dari operasional pabrik es. Petani non-elit di sisi lain memaparkan bahwa sebenarnya DLH pada tingkat provinsi DIY sebenarnya sempat mendorong pebisnis untuk menggunakan air dari PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) untuk mencukupi kebutuhan air sebesar separuh dari kapasitas usahanya, tetapi tidak disanggupi. DLH Kabupaten Sleman merasa tidak memiliki kewenangan untuk merespon aspirasi petani yang kehilangan sumber air. Petani

non-elit tidak dapat menggugat lebih lanjut keberadaan pabrik es, apalagi pebisnis memiliki hak milik atas lahan yang digunakan untuk membuat es kristal. Tabel 3 menunjukkan jalinan kuasa aktor yang membuat kelompok tani tidak berdaya menghadapi pabrik es yang mengganggu pengairan.

Tabel 3. Aktor dan Kepentingan Para Pihak terhadap Keberadaan Pabrik Es di Padukuhan Bayen, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, 2025

No	Aktor	Kepentingan
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	Menjaga investasi daerah.
2	DLH Kabupaten Sleman	Menopang investasi dengan pemberian izin lingkungan.
3	Pengusaha/investor pabrik es	Meningkatkan kapasitas produksi.
5	Aparat keamanan	Meredam protes sosial.
6	Kepala dukuh Bayen	Menjaga situasi kondusif.
7	Pihak RT 3	Menopang secara sosial keberadaan pabrik
8	Elit petani	Membiarkan kondisi seolah-olah baik-baik saja.
9	Petani non-elit	Menjaga pengairan lahan.

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Situasi di Padukuhan Bayen pada dasarnya menunjukkan bahwa gangguan pengairan dapat terjadi, akibat kerusakan lingkungan yang dipicu oleh aktivitas ekonomi non-pertanian mirip yang terjadi di desa pedesaan (Ma'mun et al., 2021). Perbedaan yang muncul di Padukuhan Bayen sebagai desa perkotaan dibandingkan dengan area desa pedesaan adalah aktivitas ekstraktif yang memunculkan gangguan pengairan adalah penopang ekonomi perkotaan seperti bisnis es kristal untuk suplai hotel dan restoran. Gangguan pengairan terus terjadi seiring dengan penguatan ekonomi perkotaan di sekitar Padukuhan Bayen yang tidak hanya memicu konversi lahan beririgasi, melainkan juga memicu berkurangnya sumber air.

Penguatan ekonomi perkotaan di sekitar Padukuhan Bayen semakin kuat dengan konstruksi proyek tol Surakarta-Yogyakarta sejak tahun 2023 yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air di saluran dan konversi lahan, di mana kelompok tani juga tidak mampu mewartakan aspirasi petani non-elit. Elit petani yang menjabat sebagai ketua poktan maupun ketua gapoktan yang juga koordinator DI Kujon dan DI Ngasem hanya menyampaikan bahwa pelaksana proyek dan kontraktor akan memulihkan sarana pengairan yang terdampak. Elit petani yang juga berstatus mantan Kepala Dukuh Bayen membiarkan pengurus lainnya bersama para anggota dengan Kepala Dukuh Bayen mengupayakan menyampaikan aspirasi mengenai pemulihan infrastruktur irigasi yang terdampak oleh pembangunan jalan tol. Elit petani mengakui bahwa hanya segelintir warga yang diajak bicara oleh pelaksana proyek mengenai dampak lingkungan dan sosial dari konstruksi tol.

Ketersediaan air semakin terbatas dengan truk tangki-air kontraktor tol yang mengambil air dari irigasi untuk menyirami area konstruksi dari debu tanpa berkoordinasi terlebih dahulu melalui kelompok tani. Elit petani di sisi lain mengakui bahwa ada dilema, sebab warga lainnya juga membutuhkan penyiraman air di area sekitar konstruksi. Penyiraman dengan truk tangki di sisi lain dianggap perlu untuk menangani debu yang beterbangan dan tanah uruk yang berjatuh berdampak membuat pengendara motor mudah tergelincir di tengah konstruksi pembangunan jalan tol. Pembahasan mengenai gangguan pengairan lahan akibat proyek tol bahkan tidak muncul sampai di Gapoktan Kalurahan Purwomartani.

Pelaksana proyek justru menyampaikan kepada petani non-elit bahwa tidak akan ada pemulihan pengairan selama tidak ada pengajuan dari kelompok tani. Sosialisasi tahap satu sampai empat yang melibatkan elit masyarakat pun memiliki topik bahasan yang berbeda-beda, di mana pemulihan pengairan tidak terlalu banyak dibahas. Petani non-elit sempat mengupayakan melakukan demonstrasi, tetapi sempat dicegah oleh kepala dukuh Bayen dan berujung pada pertemuan bersama kontraktor serta pelaksana proyek. Pertemuan tersebut hanya menghasilkan keputusan berupa penggunaan saluran drainase dari operasional tol yang sementara waktu ditimbun kembali untuk digunakan sebagai saluran irigasi darurat.

Petani non-elit dan Kepala Dukuh Bayen tidak mengetahui sampai kapan saluran darurat akan digunakan, sedangkan pihak tol bersikukuh tidak akan ada pemulihan pengairan selama tidak ada pengajuan melalui kelompok tani. Pengurus dan anggota kelompok tani tanpa melibatkan elit petani sebenarnya sempat menyampaikan pengajuan pemulihan pengairan, tetapi tidak direspon oleh pihak tol. Pengurus dan beberapa anggota kelompok tani sempat berupaya membuat saluran sendiri di sisi timur area konstruksi, tetapi dihentikan oleh kepala dukuh Bayen dengan adanya keberatan dari petani lainnya yang enggan untuk mengorbankan lahan yang tersisa untuk membuat sarana irigasi sendiri.

Ketua kelompok tani nekat mengizinkan salah satu petani untuk menggunakan kubangan di dekat saluran darurat untuk memelihara ikan. Ketua kelompok tani hanya membiarkan petani tersebut untuk membuat kolam. Elit petani kerap menyerobot penggunaan air di dekat saluran darurat pada samping area konstruksi tol dan memicu cekcok dengan petani lainnya. Tidak berjalannya operasional poktan membuat para pengurus lainnya dan anggota kelompok tani bersama kepala dukuh Bayen menegur berulang kali sopir truk tangki yang mengambil air dari sarana irigasi, tetapi tidak menimbulkan efek jera.

Para petani non-elit mencoba bertanya kepada para pekerja proyek maupun mandor, tetapi para pekerja konstruksi mengklaim tidak mengetahui gambar desain pembangunan tol. Pihak tol juga diduga mengganti staf yang memiliki tugas berkomunikasi dengan pemangku wilayah setempat seiring pergantian kepala dukuh Bayen pada tahun 2023. Para petani non-elit menduga bahwa langkah penggantian staf dilakukan untuk mencegah adanya limpahan informasi dari pemangku wilayah sebelumnya mengenai perkembangan proyek. Para petani non-elit bersama warga Bayen lainnya akhirnya mengupayakan protes dengan membuat coretan pada pagar pembatas konstruksi yang terbuat dari seng.

Para petani non-elit juga bersitegang dengan elit petani yang juga ketua gapoktan dan kepala dukuh periode sebelumnya, sebab salah satu warga yang pernah bekerja di dinas pekerjaan umum mengingatkan dampak proyek tol akan berlarut-larut. Para petani non-elit bersama warga terdampak tol lainnya tidak mau menerima begitu saja uang ganti rugi (UGR) dan mereka membentuk Paguyuban Warga Terdampak untuk menyampaikan beberapa tuntutan di antaranya berkaitan dengan pemulihan irigasi. Kemunculan Paguyuban Warga Terdampak diduga membuat elit petani tersinggung dengan merasa upayanya untuk meredam partisipasi menjadi diganggu.

Paguyuban Warga Terdampak diupayakan untuk digunakan menyampaikan aspirasi mengenai dampak tol kala kelompok tani tidak berdaya dan membangun kerjasama dengan kepala dukuh Bayen. Kepala dukuh Bayen sempat mengajukan surat keluhan kepada *jagabaya*/kepala urusan bidang pemerintahan dan keamanan Kalurahan Purwomartani untuk menyampaikan aspirasi para petani mengenai dampak tol, tetapi belum ada tindak lanjut. Kontraktor tol sendiri selalu mengklaim tidak mengetahui mengenai pemulihan pengairan saat ditanya oleh kepala dukuh Bayen.

Paguyuban Warga Terdampak di sisi lain lebih menghabiskan energi untuk mengupayakan legalitas konversi sawah menjadi hunian bagi warga terdampak yang membangun rumah baru di RT 8, sehingga aspirasi pemulihan irigasi pun menjadi dikesampingkan. Kontraktor tol di sisi lain menganggap bahwa berbagai upaya dari para petani dalam beraspirasi sebagai gangguan pembangunan. Konstruksi tol terus berjalan begitu pula pabrik es bersama pabrik dan berbagai bentuk penguatan ekonomi perkotaan lainnya dengan kelompok tani yang tidak dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi apalagi bernegosiasi dalam memastikan pengairan tidak terganggu.

Tabel 4. Aktor dan Kepentingan terkait Keberadaan Pembangunan Jalan Tol di Padukuhan Bayen, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, 2025

No	Aktor	Kepentingan
1	Pelaksana proyek dan kontraktor tol	Menyukseskan konstruksi sampai operasional proyek.
2	Pemerintah Kalurahan Purwomartani	Memastikan kondisi sosial kondusif menopang proyek.
3	Kepala dukuh Bayen	Memastikan kondisi secara sosial kondusif.
4	Elit petani	Menggunakan air sesuai kemauannya.
5	Petani non-elit	Memperjuangkan pengairan dengan baik.
6	Warga terdampak tol	Mendapatkan legalitas konversi lahan untuk hunian baru.

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Kelompok tani tidak mampu membangun jejaring kekuasaan dengan aktor lainnya untuk memfasilitasi perjuangan para petani dalam menjaga sarana pengairan lahan seiring dengan penguatan ekonomi perkotaan. Relasi kuasa di antara petani semakin cair dengan masuknya tol, tetapi juga menjadi meminggirkan posisi petani non-elit dengan tidak diikuti dengan kemampuan dan kesadaran untuk melakukan kontrol terhadap dampak penguatan ekonomi perkotaan baik dengan kehadiran pabrik dan masuknya konstruksi tol terhadap pengairan lahan pertanian (Peluso & Ribot, 2020).

Elit petani terus memperparah masalah dengan terus terlibat dalam pencurian air maupun intrik kekuasaan dengan para petani lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa elit petani yang diuntungkan dalam mengendalikan sumber daya sosial, budaya, dan material dalam relasi kuasa yang cair dengan penguatan ekonomi perkotaan. Pihak pelaksana dan kontraktor tol tentu menjadi pengendali utama pemanfaatan sumber daya untuk memuluskan konstruksi proyek sembari meminggirkan kepentingan pengairan lahan pertanian lahan yang tersisa (Peluso & Ribot, 2020). Para petani non-elit tidak mampu memiliki kontrol atas akses penggunaan air dengan merebaknya apalagi penambahan kapasitas produksi pabrik es dan masuknya proyek pembangunan jalan tol, sehingga hanya dapat mengupayakan langkah individu untuk memastikan lahan pertanian garapannya yang tersisa terus dapat digunakan dalam menopang kehidupan. Relasi yang coba dijalin antara para petani non-elit dan kepala dukuh Bayen melalui Paguyuban Warga Terdampak masih belum mampu mendorong perubahan kebijakan berkaitan penggunaan air yang menguntungkan petani di luar elit petani.

Hal tersebut dapat terjadi akibat para petani non-elit yang terlalu menaruh harapan kepada kepala dukuh Bayen selaku elit desa yang berpihak kepada mereka. Para petani non-elit di sisi lain memiliki kepentingan untuk menjaga akses atas sumber penghidupan yang tersisa (Peluso & Ribot, 2020). Konflik pada dasarnya memberi ruang bagi para petani non-elit untuk memperjuangkan hak mereka atas pengairan lahan yang terdampak penguatan ekonomi perkotaan, tetapi tanpa kemampuan mengimbangi aktor yang mengendalikan sumber daya material dan budaya menjadi sulit menjangkau keterlibatan

dalam proses kebijakan (Sikor & Lund, 2009). Klaim akses dari para petani non-elit baik melalui poktan dan Paguyuban Warga Terdampak belum berjalan dengan baik dan terjebak dalam zona abu-abu yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun investor untuk terus meminggirkan kebutuhan pengairan lahan pertanian (Sikor & Lund, 2009). Investor telah mampu membangun hubungan erat dengan pemerintah dalam memperluas ekonomi perkotaan di sekitar Padukuhan Bayen. Para petani non-elit tidak mampu membangun legitimasi kuat untuk memastikan bahwa pemerintah mau mengakui kebutuhan mereka atas pengairan yang sudah berupaya dipertahankan sejak lama (Sikor & Lund, 2009).

Kesimpulan

Beberapa penyebab ketidakberdayaan kelompok tani di Padukuhan Bayen dalam mengoordinasikan penggunaan air untuk pertanian tidak dapat dilepaskan dari elit petani yang membiarkan petani lainnya menanggung kebutuhan pengairan masing-masing. Elit petani justru menjadi aktor penyerobotan penggunaan air, di mana petani lainnya tidak berani secara langsung menindak tindakan elit petani. Elit petani tidak terlalu aktif dalam pertemuan kelompok tani, di mana koordinasi dengan PPL Kalurahan Purwomartani menyangkut budidaya pertanian lebih aktif dilakukan oleh pengurus lainnya dari poktan. Elit petani juga membiarkan petani non-elit sebatas bergantung pada komunikasi pribadi untuk menghindari penyerobotan penggunaan air. Pendampingan dan fasilitasi yang terbatas dari pemerintah daerah maupun pemerintah Kalurahan Purwomartani membuat para petani non-elit tidak mampu mengontrol kendali dari elit petani atas kelompok tani. Elit petani nekat menggunakan batu besar untuk membendung saluran irigasi tanpa berkoordinasi dengan petani non-elit. Petani non-elit tidak berani mengingatkan tindakan elit petani secara langsung. Petani non-elit memilih membuat maupun menyewa mesin diesel untuk mengambil air dari sumur yang dibuat sesamanya, demi menghindari cekcok dengan elit petani. Elit petani di Padukuhan Bayen yang sebatas mementingkan kepentingannya sendiri juga membuat warga dari padukuhan lain mengganggu pengairan lahan untuk menambang pasir dan memperluas penguasaan lahan, maupun membiarkan terjadinya konversi lahan beririgasi. Pertarungan kepentingan antara para petani semakin kuat dengan meluasnya pengembangan ekonomi perkotaan di sekitar Padukuhan Bayen. Elit petani cenderung membiarkan para petani non-elit menanggung sendiri akibat konversi lahan beririgasi maupun hilangnya sumber air seperti akibat peningkatan kapasitas produksi dari pabrik es kristal. Elit petani bersama aparat keamanan sebatas memiliki kepentingan untuk mengondisikan seolah-olah keadaan di Padukuhan Bayen tenang, dan membiarkan pebisnis pabrik es kristal mendapatkan izin lingkungan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Pemerintah daerah di sisi lain membiarkan para petani non-elit menanggung dampak hilangnya sumber air akibat kehadiran pabrik es kristal yang menyedot air dari pengeboran terhadap sumberdaya lahan lokal dan mengganggu ketersediaan air irigasi dengan alasan menjaga investasi daerah. Pengembangan ekonomi perkotaan semakin menguat dengan hadirnya proyek pembangunan jalan tol Surakarta-Yogyakarta yang semakin memperparah fragmentasi lahan dan pengairan, serta menyebabkan kemampuan petani non-elit untuk menggunakan air semakin terbatas. Elit petani pun hanya sebatas meyakinkan para petani non-elit mengenai janji pelaksana proyek dan kontraktor yang akan memulihkan sarana pengairan. Kelompok tani tidak mampu secara aktif digunakan untuk mengadvokasi aspirasi para petani non-elit untuk menangani dampak penguatan ekonomi perkotaan akibat operasional pabrik es bersama pabrik lainnya maupun masuknya pembangunan jalan tol. Para petani non-elit bersama kepala dukuh Bayen hanya mampu mendorong penggunaan saluran drainase tol sebagai irigasi darurat selama masa konstruksi. Elit petani justru terus menjadi aktor penyerobotan penggunaan air bahkan di area sekitar irigasi darurat.

Daftar Pustaka

- Alaerts, G. J. (2020). Adaptive Policy Implementation: Process and Impact of Indonesia's National Irrigation Reform 1999-2018. *World Development*, 129, 1-14.
- Alcon, F., Zabala, J. A., Martínez-García, V., Albaladejo, J. A., López-Becerra, E. I., De-Miguel, M. D., & Martínez-Paz, J. M. (2022). The Social Wellbeing Of Irrigation Water. A Demand-Side Integrated Valuation In A Mediterranean Agroecosystem. *Agricultural Water Management*, 262, 1-15.
- Arifah, Salman, D., Yassi, A., & Bahsar-Demmellino, E. (2022). Climate Change Impacts And The Rice Farmers' Responses at Irrigated Upstream and Downstream in Indonesia. *Heliyon*, 8(12), 1-12.
- Budiman, S. A., Rondhi, M., Khasan, A. F., Peratama, B., Rokhani, R., Suwandari, A., Ridjal, J. A., Soemarno, Prijono, S., & Soedarto, S. (2021). Water Scarcity, Mountain Deforestation And The Economic Value Of Water In A Small-Scale Irrigation System: A Case Study In East Java, Indonesia. *Quaestiones Geographicae*, 40(2), 153-166.
- D'Odorico, P., Dell'Angelo, J., & Rulli, M. C. (2024). Appropriation Pathways of Water Grabbing. *World Development*, 181, 1-12.
- Gatti, N., Baylis, K., & Crost, B. (2021). Can Irrigation Infrastructure Mitigate The Effect Of Rainfall Shocks On Conflict? Evidence From Indonesia. *American Journal of Agricultural Economics*, 103(1), 211-231.
- Harrison, E. (2020). 'People Are Willing To Fight To The End'. Romanticising The 'Moral' In Moral Economies Of Irrigation. *Critique of Anthropology*, 40(2), 194-217.
- Jansing, M. S., Mahichi, F., & Dasanayake, R. (2020). Sustainable Irrigation Management in Paddy Rice Agriculture: A Comparative Case Study of Karangasem Indonesia and Kunisaki Japan. *Sustainability*, 12(3), 1-16.
- Ma'mun, S. R., Loch, A., & Young, M. D. (2021). Sustainable Irrigation in Indonesia: A Case Study of Southeast Sulawesi Province. *Land Use Policy*, 111, 1-12.
- Nawiyanto, B., Husain, S. B., Wisnu, & Nai'm, M. (2024). Controlling the Brantas River: Construction and Impact of Japan-supported Irrigation Infrastructure on the Agricultural Economy and the Environment in East Java. *Cogent Arts & Humanities*, 11(1), 1-22.
- Nugroho, H. Y. S. H., Indrawati, D. R., Wahyuningrum, N., Adi, R. N., Supangat, A. B., Indrajaya, Y., Putra, P. B., Cahyono, S. A., Nugroho, A. W., Basuki, T. M., Savitri, E., Yuwati, T. W., Narendra, B. H., Sallata, M. K., Allo, M. K., Bisjoe, A. R., Muin, N., Isnani, W., Ansari, F., Hani, A. (2022). Toward Water, Energy, and Food Security in Rural Indonesia: A Review. *Water*, 14(10), 1-25.
- Okura, F., Budiasa, I. W., & Kato, T. (2022). Exploring a Balinese irrigation Water Management System Using Agent-Based Modeling and Game Theory. *Agricultural Water Management*, 274, 1-14.
- Peluso, N. L., & Ribot, J. (2020). Postscript: A Theory of Access Revisited. *Society & Natural Resources*, 33(2), 300-306.
- Ricks, J. I. (2016). Building Participatory Organizations for Common Pool Resource Management: Water User Group Promotion in Indonesia. *World Development*, 77, 34-47.
- Rif'an, A. A. (2019). Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis dan Citra Satelit Resolusi Tinggi Untuk Mengetahui Dinamika Penggunaan Lahan Akibat Urban Sprawl Kawasan Perkotaan Yogyakarta di Kabupaten Sleman. *Jurnal Hasil Penelitian di Kabupaten Sleman*, 6(1), 35-46.

- Rondhi, M., Khasan, A. F., Mori, Y., & Kondo, T. (2020). Absence of Legislation and the Quest for an Effective Mode of Governance in Agricultural Water Management: An Insight from an Irrigation District in Central Java, Indonesia. *Irrigation and Drainage*, 69(4), 572-583.
- Rondhi, M., Suherman, S. J. H., Hensie, C. B., Ulum, S., Suwandari, A., Rokhani, Mori, Y., & Kondo, T. (2024). Urbanization Impacts on Rice Farming Technical Efficiency: A Comparison of Irrigated and Non-Irrigated Areas in Indonesia. *Water*, 16(5), 1-16.
- Rustinsyah, R. (2019). Determining the Satisfaction Level of Water User Association Service Quality for Supporting Sustainable Rural Development. *Development Studies Research*, 6(1), 118-128.
- Rustinsyah, R., & Prasetyo, R. A. (2019). Stakeholder Engagement In A Water User Association For Agricultural Irrigation Management In The Villages In Indonesia. *Journal of Water and Land Development*, 40(1), 181-191.
- Sikor, T., & Lund, C. (2009). Access And Property: A Question of Power and Authority. *Development and Change*, 40(1), 1-22.
- Sriartha, I. P., Giyarsih, S. R., & Purnamawati, I. G. A. (2023). Comparing the Adaptive Capacity of Traditional Irrigated Rice Fields Farmers in Urban and Rural Areas to Climate Change in Bali, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 1-21.
- Suhardiman, D. (2018). Linking Irrigation Development with the Wider Agrarian Context: Everyday Class Politics in Water Distribution Practices in Rural Java. *The Journal of Development Studies*, 54(3), 413-425.
- Tirtalistyani, R., Murtiningrum, M., & Kanwar, R. S. (2022). Indonesia Rice Irrigation System: Time For Innovation. *Sustainability*, 14(19), 12477.